



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTADI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG BIDANG IV
3. NHK : 852154

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/54 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah Seluas 420 m² di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 181.500.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 91.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	555.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.577.500.000
III. HUTANG	Rp.	128.354.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.449.145.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.